

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFINA A.DEU,SKM. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TUTY ZARFIANA, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Februari Tahun 2023.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 02 Februari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA.

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya / IVd
Nip. 19650211 199006 2 001

ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010

**PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	• Sasaran Kegiatan Terlaksananya Sistikm Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	❖ Nilai SAKIP	76
2	• Sasaran Kegiatan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	❖ Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	• Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	❖ Presentase Realisasi Anggaran	100%

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 29.965.650	APBD
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian. Perangkat Daerah	Rp. 208.575.000	APBD
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Rp. 7.316.544.712	APBD
TOTAL	Rp. 7.555.085.362	

Palu, 02 Februari 2023

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.

TUTY ZARFIANA, SH, M, Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.

ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEYKE M. WONGKAR, S.Farm. M.Si. Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan KIE, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Februari Tahun 2023.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 02 Februari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
ADVOKASI DAN KIE

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

MEYKE M. WONGKAR, S.Farm, M.Si. Apt
Pembina IV/a
Nip. 19690519 199403 2 010

**PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK ADVOKASI DAN KIE
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran Program Pengendalian Penduduk Menurunnya Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate) dari Tahun 2022 mencapai 2,32 pada Tahun 2023 Target menjadi 2,55 ▪ Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pemanfaatan GDPK Tingkat Provinsi - Sasaran Kegiatan Tersedianya Data Keluarga yang Mutakhir - Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK - Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain - Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Capaian Pengendalian Penduduk - Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi - Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK - Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain - Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Program,Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 825.588.400	APBD
1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp. 363.508.900	
- Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Rp. 203.766.600	
- Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Rp. 159.742.300	
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Rp. 462.079.500	
- Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Rp. 245.000.000	
- Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Rp. 119.890.000	

- Penyediaan Dukungan
Penyelenggaraan Pendataan
dan Pemutakhiran Data
Keluarga

Rp. 97.189.500

Palu, 02 Februari 2023

PIHA KEDUA

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
ADVOKASI DAN KIE**

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

MEYKE M. WONGKAR, S.Farm, M.Si. Apt
Pembina IV/a
Nip. 19690519 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. BURHAN TAHIR , MM. Apt
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Februari Tahun 2023.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 02 Februari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.

KEPALA BIDANG KB KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

Drs. H. BURHAN TAHIR, MM. Apt
Pembina Tkt I
Nip19670704 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TENGAH TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Sasaran Program Pembinaan Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalenci Rate / mCPR) dengan Target tahun 2022 75,40 dan Data Capaian tahun 2022 mencapai 61,24 Pada Tahun 2023 target menjadi 75,50 - Meningkatnya Peserta KB Aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari tahun 2022 Target 13 % menjadi 13,55 pada Tahun 2023 - Menurunkan Presentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need) dari tahun 2022 target 14,63 Data Capaian 28,16 Pada Tahun 2023 Target menjadi 14,54 	Presentase Capaian Pembinaan Keluarga Berencana.	100%
a.	<p>Sasaran Kegiatan Meningkatnya Peserta yang mengikuti Advokasi dan KIE KB Kespro serta provider yang memahami promosi KIE KB</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sasaran Sub Kegiatan Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal ➢ Sasaran Sub Kegiatan Terwujudnya Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ➢ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal ➢ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 	<p>a. Presentase Peserta yang mengikuti Advokasi dan KIE KB Kespro serta provider yang memahami promosi KIE KB dan kespro dalam upaya mendukung penurunan stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal ➢ Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ➢ Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal ➢ Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 	<p>100%</p> <p>77 Laporan</p> <p>14 Dokumen</p> <p>14 Dokumen</p> <p>14 Laporan</p>
b.	<p>Sasaran Kegiatan Terlaksananya Organisasi dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB ➢ Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhi Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 	<p>b. Presesntase Peserta yang memahami Manfaat Promosi KIE KB dan Kespro untuk meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan serta terlibat dalam keberlangsungan Penggunaan Kontraespsi dalam Upaya mendukung Penurunan Stunting.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB ➢ Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 	<p>100%</p> <p>77 Dokumen</p> <p>77 Organisasi</p>
2.	<p>Sasaran Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun (Age Specific Fertelity Rate / ASFR) pada tahun 	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%

	<p>2022 Target 50/1000 data capaian 36/1000 pada Tahun 2023 Target menjadi 49/1000</p> <p>a. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Organisasi /Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) ➤ Sasaran Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK ➤ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 	<p>Jumlah Kelompok Tribina dan PIK Remaja serta lokus Stunting yang mendapat Pembinaan dan Pendidikan Ketahanan Keluarga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ➤ Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ➤ Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana ➤ Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ➤ Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) ➤ Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) ➤ Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ➤ Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ➤ Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga ➤ Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK ➤ Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 	<p>100%</p> <p>1 Dokumen</p> <p>13 Dokumen</p> <p>500 Orang</p> <p>1 Laporan</p> <p>50 Organisasi</p> <p>2 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>13 laporan</p> <p>13 Dokumen</p> <p>1 Unit</p> <p>20 Kelompok</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Dokumen</p>
	<p>b. Sasaran Kegiatan Terlaksananya laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terwujudnya Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga ➤ Sasaran Sub Kegiatan Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 	<p>Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat bimbingan dan pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ➤ Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ➤ Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga ➤ Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 	<p>1 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Dokumen</p>

➤ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	➤ Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1 Dokumen
---	---	-----------

Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 800.038.350	APBD
a. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 444.212.750	
<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal • Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK • Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal • Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi. 	Rp. 78.017.150	
	Rp. 110.501.050	
	Rp. 162.472.700	
	Rp. 93.221.850	
b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB.	Rp. 355.825.600	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB • Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 	Rp. 231.624.950	
	Rp. 124.200.650	
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.586.661.600	
a. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.199.556.500	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ▪ Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ▪ Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana ▪ Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ▪ Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) ▪ Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) ▪ Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK ▪ Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK ▪ Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK ▪ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK ▪ Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 	Rp. 114.265.000	
	Rp. 211.144.850	
	Rp. 87.500.000	
	Rp. 128.522.700	
	Rp. 51.912.350	
	Rp. 51.699.800	
	Rp. 49.521.800	
	Rp. 50.730.000	
	Rp. 57.170.150	
	Rp. 48.539.950	
	Rp. 348.550.000	
b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta	Rp. 387.105.000	

**Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Provinsi
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga**

- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Rp. 132.700.200
- Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rp. 69.408.100
- Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Rp. 57.496.000
- Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rp. 100.000.050
- Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB Rp. 27.500.750

T o t a l

Rp. 2. 386. 699. 950

Palu,02 Februari 2023

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG KB KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Drs. H. BURHAN TAHIR, MM. Apt
Pembina Tkt I
Nip19670704 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARLIANY ROTINSULU, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program , Keuangan dan Asset Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Februari Tahun 2023

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 02 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN
DAN ASSET.

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

MARLIANY ROTINSULU, ST
Penata Tkt. I/IIIId
Nip. 19760315 201001 2 005

ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt. I/IVb
Nip. 19670701 198903 2 010

**PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASSET
TAHUN 2023**

N O	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD • Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD • Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 64 Orang 2 Dokumen 1 Laporan
	<p>Sasaran Kegiatan Tersedianya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan • Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah DP2KB • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 	<ul style="list-style-type: none"> 100 Unit 3 Unit 37 Unit 15 Unit 22 Unit

Kegiatan,Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.916.900	APBD
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 14.999.850	
- Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Rp. 3.000.000	
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 10.048.900	
- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.367.184.712	
- Sub.Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 906.060.000	

- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 43.300.000
1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 714.000.000
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 714.000.000
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 303.870.000
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Baiaya Pemeliharaan,Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 276.000.000
- Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Rp. 27.870.000
T o t a l	Rp. 1.017.870.000

Palu, 02 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN
DAN ASSET.

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

MARLIANY ROTINSULU, ST
Penata Tkt. I/IIIId
Nip. 19760315 201001 2 005

ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt. I/IVb
Nip. 19670701 198903 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENI, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Februari Tahun 2023.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 02 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM.

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENI, SKM
Penata Muda Tkt.I/ IIIb
Nip. 19800402 200701 1 006

ALFINA A. DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010

**PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ▪ Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ▪ Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>2 Paket</p> <p>1 Dokumen</p> <p>4 Orang</p>
1.	<p>Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Bahan Logistik Kantor ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ketatausahaan dan kepegawaian. ▪ Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ▪ Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ▪ Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ▪ Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	<p>100%</p> <p>1 Paket</p> <p>3 Paket</p> <p>2 Paket</p> <p>13 Laporan</p>
2.	<p>Sasaran Kegiatan Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ▪ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ▪ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 	<p>100 %</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>

Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 101.040.000	APBD
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 53.035.000	
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 54.500.000	
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.511.862.245	
- Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 67.430.595	
- Sub .Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 196.520.000	
- Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 36.414.750	
- Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.211.496.900	

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 510.078.755
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 349.861.400
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 160.217.355
T o t a l	Rp. 2.021.941.000

Palu,02 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM.

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENI, SKM
Penata Muda Tkt.I/ IIIb
Nip. 19800402 200701 1 006

ALFINA A. DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010